JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (JSEP)
E-ISSN 3021-8063
JSEP: Vol 3. No 1. 2025
Website Jurnal: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jsep

ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG DIMODERASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Nursila T. Ahmat[1], Syarwani Canon[2], Fitri Hadi Yulia Akib[3], Fahrudin Zain Olilingo[4]

Universitas Negeri Gorontalo,Gorontalo, Indonesia [1,2,3]

E-mail penulis[1]: nursilas1ekobang@mahasiswa.ung.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the effect of regional spending on education, health and regional fiscal independence on the human development index moderated by gross regional domestic product (GRDP) in eastern Indonesia. The data used in this study are secondary data sourced from the Directorate General of Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Central Bureau of Statistics, which are obtained from 13 provinces in Eastern Indonesia. This study uses Multiple Linear Regression Analysis of Panel data using the Fixed Effect Model (FEM) and moderation using Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that 1). Local expenditure on education has a positive and significant effect on the Human Development Index. 2). Regional expenditure in the health sector has a positive and significant effect on the Human Development Index. 3). Fiscal Independence has a positive and significant effect on the Human Development Index. 4). Gross Regional Domestic Product (GRDP) is able to moderate (strengthen) the effect of education expenditure on the Human Development Index. 5). Gross Regional Domestic Product (GRDP) is not able to moderate (weaken) the effect of health expenditure on the human development index. 6). Gross Regional Domestic Product (GRDP) is able to moderate (strengthen) the effect of regional fiscal capacity on the human development index.*

Keywords: HDI, Regional Expenditure on Education, Health, Regional Fiscal Independence, and Gross Regional Domestic Product (GRDP)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kawasan Timur Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Kementrian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik, Yang di peroleh dari 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian Ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda data Panel dengan menggunakan Model Fixed Effect Model (FEM) dan moderasinya menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Belanja daerah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 2). Belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 3). Kemandirian Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 4). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 5). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak mampu Memoderasi (Memperlemah) Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 6). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: IPM, Belanja Daerah Bidang Pendiidkan, Kesehatan, Kemandirian Fiskal Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PENDAHULUAN

Manusia adalah aset utama dalam membangun suatu negara atau wilayah, dan pembangunan manusia adalah indikator penting untuk mengukur kemajuan suatu negara atau wilayah. Kemajuan tidak hanya diukur dari segi pembangunan fisik saja, melainkan juga dari aspek harapan hidup dan pendidikan masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan manusia, melalui alokasi dana dan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur umum yang digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang menggambarkan hasil pembangunan manusia melalui tiga komponen indikator utama, yaitu kesehatan, kualitas pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti daya beli yang merata di masyarakat (Machmud, 2019).

Indonesia memiliki 34 provinsi saat sebelum dilaksakannya otonomi daerah, provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam perjalanannya, ternyata kedua Kawasan tersebut memperhatikan kecenderungan bahwa provinsi yang terletak dikawasan barat Indonesia pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang cepat dan pesat dibandingkan daerah atau provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (Susanto & Pangesti, 2021).

Indonesia Timur terdiri dari 13 provinsi, dengan pusat-pusat ekonomi utamanya terletak di Makassar, Denpasar, dan Manado. Dalam hal pembangunan, Indonesia Timur mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan Indonesia Barat (Sumatra, Jawa, dan Kalimantan). Menurut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya tiga provinsi di Indonesia Timur, yaitu Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, yang memiliki IPM dalam kategori tinggi. Seiring dengan semangat otonomi daerah dan fokus pada pembangunan nasional, ekonomi Indonesia Timur Rauf, (2021).

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan dengan maksimal, termasuk melalui peningkatan tingkat pendidikan, maupun di Provinsi yang berada di di Kawasan Timur Indonesia. Indonesia telah mengakui pentingnya pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan, seperti yang tercermin dalam berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dari masa orde lama hingga era reformasi. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menegaskan pentingnya "mencerdaskan kehidupan bangsa," yang erat kaitannya dengan sektor pendidikan.

Komitmen pemerintah dalam membangun kualitas manusia dapat dilihat melalui alokasi pengeluaran pemerintah dari tiga jenis belanja yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrasturktur. Sektor Pendidikan memliki peran penting untuk menciptakan sumber daya dan pembangunan manusia. Dengan demikian sekurang-kurangnya ada dua bidang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sesuai dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu bidang pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mewujudkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya melalui peran alokasi belanja pemerintah di bidang pendidikan (Mongan, 2019).

Menurut Mangkoesoebroto (2016), belanja pemerintah menggambarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang memutuskan suatu kebijakan memiliki konsekuensi biaya yang mesti dikeluarkan. Biaya tersebut dianggarkan dari anggaran pemerintah yang menjadi belanja bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang memperlihatkan komitmen pemerintah dalam permasalahan di bidang tersebut. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan pembangunan masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mulai berlaku sejak diterbitkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. APBN dan APBD menjadi alat utama pemerintah untuk meningkatkan ksejahteraan masyarakat. Dalam (Wikaningrum, 2021)

Menurut (Mongan, 2019) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan sifnifikan antara belanja daera bidang pendidikan denga indeks pembangunan manusia di Indonesia. Menurut, (Keysa Elviora Djodjobo, 2021) menyimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi sulawesi utara. Hal yang sama ditemukan oleh (Charenza Lazuardy Pratama & Mandai, 2023) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh belanja daerah bidang pendidikan terhadap ipm di provinsi jawa barat.

Dewasa ini, pembangunan manusia merupakan elemen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan timur indonesia. selain itu dalam mengukur indeks pembangunan manusia dibutuhkan komponen pembentuk yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran perkapita. Lebih lanjut kondisi indeks pembangunan manusia di kawasan timur indonesia mengalami trend peningkatan, akan tetapi belum terlalu signifikan seperti yang diharapkan. Olehnya ketika indeks pembangunan manusia tidak di dorong secara komprehensif maka dapat menyebabkan persoalan yang kompleks.

Selain itu belanja daerah bidang pendidikan di kawasan timur indonesia cenderung mengalami fluktuatif. Artinya bahwa ketika belanja daerah bidang pendidikan mengalami penurunan otomatis akan berdampak pada indeks pembangunan manusia. Apalagi ketika daerah belum mampu tumbuh dengan pertumbuhan anggarannya sendiri tentu ini berdampak pada penurunan indeks pembangunan manusia.

Belanja daerah bidang kesehatan di kawasan timur indonesia cenderung mengalami fluktuatif. Artinya bahwa ketika tidak ada kestabilan anggaran dalam memenuhi bidang kesehatan tentu dapat mempengaruh indeks pembangunan manusia di kawasan timur indonesia. apalagi ketika daerah masih bergantung dana transfer dari pemerintah pusat, maka tentu ini dapat mengancam kualitas hidup manusia di kawasan timur indonesia. Selain belanja daerah bidang pendidikan dan kesehatan, kemandirian fiskal pun dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang menghitung kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Artinya bahwa ketika kemandirian fiskal rendah otomatis daerah masih terus bergantung dengan pemerintah pusat serta belum mampu mengelola keuangan daerahnya. Kemandirian fiskal menarik untuk dibahas sebab masih banyak daerah yang kemandirian keuangannya masih sangat rendah.
Berdasarkan Literatur dan fenomen gap pada latar belakang masalah, maka perlu menelisik lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia.

JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (JSEP)
E-ISSN 3021-8063
JSEP: Vol 3. No 1. 2025
Website Jurnal: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jsep

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pada pendekatan ini menjabarkan permasalahan serta di analisis berupa angka mulai dari pengumpulan penafisaran sampai mendapatakan hasil akhir. Penelitian kuantitatif diperlukan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di Gorontalo dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Penelitian ini mengambil dan menetapkan objek penelitian di Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan September 2023.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu) 13 Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia. Data yang diperoleh adalah data dalam tahunan masing-masing variabel, baik berupa data yang telah disaji maupun serta sumber relevan untuk keperluan analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018-2022.
2. Data Belanja Pendidikan pada 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018-2022.
3. Data Belanja Kesehatan pada 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018-2022.
4. Data Kemandirian Fiskal Daerah pada 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018-2022.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda data panel, data panel adalah gabungan dari data cross section dan data time series, data cross section, diperoleh dari data Kawasan Sulawesi, Maluku dan Paua. Sedangkan data time series diambil dari tahun 2016-2022. Maka persamaan terbentuk dari variabel independen dan dependen sebagai berikut:

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda data panel, data panel adalah gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, data *cross section*, diperoleh dari 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan data *time series* diambil dari tahun 2018-2022. Maka persamaan terbentuk dari variabel independen dan dependen sebagai berikut :

$$\mathbf{IPM_{it} = \alpha_0 + \beta_1\, BP_{it} + \beta_2\, BK_{it} + \beta_3\, KFD + \varepsilon_{it}}$$

Dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia
α_0 = Konstanta/ Intercept
$\beta_{1,2,3,}$ = Koefisien Regresi Parsial
BP = Belanja Pendidikan
BK = Belanja Kesehatan
KFD = Kemandirian Fiskal Daerah
ε = *Error*
i = *Cross Section*
t = *Time Series*

JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (JSEP)
E-ISSN 3021-8063
JSEP: Vol 3. No 1. 2025
Website Jurnal: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jsep

HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan gambaran obyektif mengenai temuan riset, melibatkan interpretasi data, hasil interpretasi, serta hubungan yang terungkap. Apabila terdapat hipotesis, bagian ini menjelaskan langkah-langkah dan hasil uji hipotesis. Untuk memastikan pemahaman yang optimal bagi pembaca, penyajian hasil penelitian harus dilakukan dengan kejelasan dan struktur teratur.

PEMILIHAN MODEL

Tabel 1. Pemilihan Model

Pengujian	Test	Prob.	Keputusan
Uji Chow	Cross Section F	0.0000***	**FEM (ρ<α)**
Uji Hausman	Cross Section Random	0.0000***	**FEM (ρ<α)**

*Keterangan : ***) signifikan di 1%, **) signifikan di 5% dan *) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan*
Sumber: BPS, (Diolah), 2023

Berdasarkan hasil estimasi sebelumnya pada Tabel 1 dapat dibandingkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model fixed effect model, hal ini dikarenakan dalam tahapan pengujian Chow-Test terlihat ϱ-cross section F signifikan pada tingkat alpha 1% dan selanjutnya pada Hausmant-Test terlihat bahwa ϱ-cross section random kurang dari tingkat kepercayaan 1% sehingga dalam penentuan ini digunakan fixed effect model.

REGRESI LINEAR BERGANDA

Setelah melakukan analisis regresi dan memilih model data panel, hasil analisis menunjukkan penggunaan Fixed Effect Model (FEM). Berikut adalah hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model yang disajikan dalam Tabel 2:

Variable	Coefficient	Prob.
C	6.403.749	0.0000***
BP	1.06E-13	0.0955*
BK	5.39E-13	0.0892*
KFD	0.064365	0.0000***
PDRB	2.55E-14	0.0000***
Adjusted R-squared	0.987639	
F-statistic	3.206.028	
Prob(F-statistic)	0.000000	

*Keterangan : ***) 1%, **) 5%, *) Signifikan 10% dan NS) Tidak Signifikan*
Sumber: BPS, (Diolah), 2023

Model inferensi diatas dapat di intrepretasikan dalam kalimat sebagai berikut:
1) IPM = Merupakan penyebut dari variabel Indeks Pembangunan Manusia dan apabila variabel di dalam model penelitian diabaikan (dianggap konstan) maka Indeks Pembangunan Manusia bernilai sebesar 6.403.749 persen.
2) BP = Belanja Pendidikan, berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3) BK = Belanja Kesehatan, berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4) KFD = Kemandirian Fiskal Daerah, berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto, berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian garis regresi dengan data atau untuk menilai persentase variasi total dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik garis regresi dalam menjelaskan data aktual. Sebaliknya, semakin mendekati nol, menunjukkan bahwa garis regresi kurang efektif dalam menjelaskan data.

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan presentase perubahan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai R-Squared digunakan sebagai tolak ukur ketika variabel pengganggu hanya satu, sementara Adjusted R-Squared (R-Squared yang disesuaikan) digunakan jika terdapat lebih dari satu variabel pengganggu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, Adjusted R-Squared digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat koefisien determinasi.

Dari Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.987639 atau 98.76 persen. Keputusan yang diambil adalah bahwa 98.76 persen dari variasi variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemandirian Fiskal Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjelaskan variabel Indeks Pembangunan Manusia. Sisanya sebesar 1.14 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar cakupan pengamatan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dalam jangka panjang dapat diketahui bahwa semua variabel dibawah 10. Dalam model jangka pendek juga semua variabel dibawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis dapat mengabaikan asumsi ini.

UJI SIGNIFIKAN SIMULTAN

Pengujian berikutnya ditujukan untuk menganalisis kesesuaian model, dan statistik uji F dirancang untuk menjadi acuan dalam mengambil keputusan apakah variabel eksternal seharusnya dimasukkan dalam model dan dapat menggambarkan hubungan linear dengan variabel internal. Dari Tabel 4.6, dapat diamati bahwa nilai nilai Prob. F-Statistik adalah (0.000000) > α 0,01. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemandirian Fiskal Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

UJI PARSIAL (UJI-t)

1) Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien Belanja Pendidikan sebesar 1.06E-13 dan nilai ϱ (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0955. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka nilai p-value yang diperoleh masih lebih kecil dari taraf signifikan 0.10 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, keputusannya adalah Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia selama kurun waktu 2018-2022.

2) Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien Belanja Kesehatan sebesar 5.39E-13 dan nilai ϱ (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0892. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka nilai p-value yang diperoleh masih lebih kecil dari taraf signifikan 0.10 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, keputusannya adalah Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia selama kurun waktu 2018-2022.

3) Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0.064365 dan nilai ϱ (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0000. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka nilai p-value yang diperoleh masih lebih kecil dari taraf signifikan 0.01 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, keputusannya adalah Kemandirian Fiskal Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia selama kurun waktu 2018-2022.

MODERATED REGRESSION ANALYSIS (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai persamaan model regresi data panel pada variabel moderasi, dimana dalam persamaan regresinya mempunyai interaksi perkalian antara dua ataupun lebih dengan variabel independen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang akan memoderasi hubungan antara Belanja Pendidikan (BP), Belanja Kesehatan (BK) dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keputusan hipotesis dalam uji Moderated Regression Analysis (MRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Keputusan Hipotesis Dalam Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

H_0	Nilai Probability > a 0.05
	Variabel Moderasi Memperlemah Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen
H_1	Nilai Probability < a 0.05
	Variabel Moderasi Memperkuat Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Apabila nilai Probability > α 0,05 maka H0 ditolak dan mengartikan bahwa variabel moderasi memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai Probability < α 0,05 maka H0 diterima dan mengartikan bahwa variabel moderasi memperkuat variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.25734	0.268631	246.6483	0.0000
X1_Z	1.79E-27	4.18E-28	4.283933	0.0001
X2_Z	8.15E-28	2.80E-27	0.290959	0.7723
X3_Z	6.37E-16	7.50E-17	8.487646	0.0000

Sumber : BPS, diolah, (2023)

Berdasarkan tabel 4 hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) maka dapat diketahui sebagai berikut:
1) Pada interaksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Pendidikan memiliki nilai probability sebesar 0.0001 < 0.05 maka H1 ditolak dan mengartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2) Pada interaksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Kesehatan memiliki nilai probability sebesar 0.7723 > 0.05 maka H0 ditolak dan mengartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3) Pada interaksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kapasitas Fiskal daerah memiliki nilai probability sebesar 0.0000 < 0.05 maka H1 ditolak dan mengartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh kapasitas Fiskal Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

UJI NORMALITAS RESIDUAL

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dari variabel penganggu atau nilai residu. Hal ini bisa diketahui dengan membandingkan tingkat alpha sebesar (1%, 5%, 10%) dengan nilai Jarque-bera yang diperoleh dari hasil regresi.

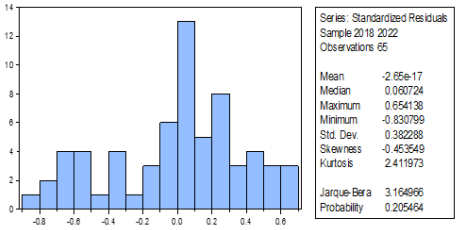

Sumber: BPS, (Diolah), 2023

Gambar 1 Hasil uji Normalitas Residual

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa Nilai Jarque-Bera yang diperoleh sebesar 3.164966 dengan nilai ϱ (Prob) sebesar 0.205464 yang bernilai lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat (α=5%) Sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

UJI MULTIKOLENIARITAS

Beberapa hubungan linier (Pendeteksian Multikolinearitas) dapat dimanifestasikan secara statistik (VIF) maupun matematis (Matriks). Dan dalam pengujian ini mengunakan salah satunya saja yakni dalam bentuk statistik (VIF) sedangkan dalam bentuk matematis kurang cocok pada data panel. Faktor varians inflasi (Vector Inflation Factor/VIF) dilakukan dengan meregresikan masing-masing variabel bebas. Dimana nilai R2 digunakan sebagai landasan mengukur korelasinya, maka nilai VIF antara lain sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikoleniaritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.277019	181.3178	NA
BP	3.89E-27	7.259306	2.047291
BK	9.65E-26	15.66786	1.296832
KFD	0.000139	67.60123	2.224452
PDRB	2.42E-29	163.8321	1.921711

Sumber: BPS, (Diolah), 2023

Hasil Pengujian Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai dari VIF Keempat Variabel Independent kurang dari 10 (VIF<10) maka dengan demikian, dalam model penelitian ini tidak terjadi Multikoleniaritas antara variabel Independent.

UJI HETERSOKEDASTISITAS

Model regresi dengan heteroskedastisitas mengandung konsekuensi serius pada estimator metode OLS karena tidak lagi BLUE. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah suatu model mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak. Uji Gletsjer digunakan dalam tahapan pengujian ini, dimana hanya membandingkan nilai dari estimasi absolute residual (RESABS) dengan Variabel bebas. Akan tetapi variabel independent menunjukkan nilai yang kurang dari tingkat alpha 0,05, maka dapat disimpulkan terkena heteroskedastisitas. Sehingga uji ini diubah menggunakan regresi Robust Least Square guna mengatasi masalah heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.707935	0.521475	1.357562	0.1810
BP	-2.88E-14	5.51E-14	-0.523172	0.6033
BK	-2.13E-13	1.95E-13	-1.092908	0.2799
KFD	0.003528	0.010327	0.341667	0.7341
PDRB	-3.68E-15	4.78E-15	-0.770734	0.4446

Sumber : BPS, (Diolah), 2023

Berdasarkan Hasil pengujian Heteroskedastisitas pada tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai probabilitas dari variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemandirian Fiskal Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan nilai lebih besar dari alpha ataupun tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Artinya dapat dijelaskan bahwa estimasi model penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.
dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengujian Hipotesis estimasi dalam model penelitian ini maka dapat ditelaah lebih lanjut mengenai Setelah melakukan pengujian Hipotesis estimasi dalam model penelitian ini maka dapat ditelaah lebih lanjut mengenai Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kawasan Timur Indonesia. Dibawah ini merupakan Hasil pengujian dari masing-masing Variabel bebas terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018-2022. Dibawah ini merupakan Hasil pengujian dari masing-masing Variabel bebas terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018-2022.

Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan hasil analisis bahwa Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia. Temuan ini dapat di intrepretasikan bahwa setiap peningkatan Belanja Pendidikan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Peningkatan belanja pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Teori Pengeluaran Pemerintah Adolf Wagner yang menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah terjadi seiring dengan peningkatan fungsi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Aliran neoklasik juga menyatakan bahwa pemerintah lebih efektif dalam menyediakan barang publik daripada swasta.

Penelitian oleh (Tjodi et al., 2019) menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan di setiap provinsi Indonesia digunakan untuk memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat, yang dianggap sebagai tahap awal dalam membentuk karakter sumber daya manusia yang unggul. Investasi dalam pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh penelitian oleh (Mongan, 2019), dianggap sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh S. P. S. Diba et al. (2018) menunjukkan bahwa alokasi dana pemerintah daerah untuk pendidikan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah dalam pendidikan berpengaruh terhadap IPM, dengan meningkatkan kemampuan intelektual dan produktivitas ekonomi. Melalui pendidikan, masyarakat memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah dalam masyarakat, serta pada peningkatan IPM.

Teori Human Capital juga menekankan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan keberhasilan pembangunan manusia. Undang-undang menetapkan alokasi dana pendidikan dalam UU Nomor 23 Pasal 49 ayat satu. Undang-undang tersebut menetapkan alokasi dana minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, serta minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi dana minimal untuk pendidikan, namun, proporsi alokasi ini bervariasi berdasarkan tingkat IPM daerah. Meskipun demikian, setiap provinsi diharuskan untuk memberikan alokasi dana untuk pendidikan sesuai dengan kewajibannya. Ini menjadikan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh pada IPM di Indonesia secara teknis.

Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan hasil analisis bahwa Belanja Kesehatan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia. Temuan ini dapat di intrepretasikan bahwa setiap peningkatan Belanja Kesehatan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Belanja daerah yang dikaitkan dengan fungsi kesehatan merupakan bagian penting dari alokasi anggaran daerah yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, dengan tujuan meningkatkan output di sektor kesehatan. Realisasi APBD yang signifikan untuk bidang kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan menjadi faktor penentu dalam mengevaluasi tingkat kesehatan masyarakat (Mongan, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Mahulauw et al., 2017), (Siregar et al., 2017) dan (Safitri, 2016) yang menegaskan bahwa belanja daerah di bidang kesehatan berdampak positif dan signifikan terhadap IPM.

Kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi setiap individu, dan tanpa kesehatan yang memadai, masyarakat tidak dapat mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan oleh negara. Jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk menjadi kunci bagi kelangsungan kegiatan ekonomi suatu negara. Belanja kesehatan diharapkan dapat mempercepat pembangunan manusia melalui dua jalur utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup dengan mengurangi tingkat kematian serta meningkatkan proses pembelajaran (Aviyati dan Susilo, 2016).

Hasil penelitian Mahulauw et al. (2017) menyatakan bahwa tingkat kesehatan yang baik dapat berdampak positif pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan harapan hidup dan pengurangan angka kematian. Belanja fiskal pada bidang kesehatan dianggap efektif dalam mendukung pembangunan manusia, karena masyarakat yang lebih sehat memiliki potensi untuk hidup lebih lama dan bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi. Tingkat kesehatan yang baik juga memberikan akses lebih baik ke pendidikan tinggi.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari besarnya pembiayaan untuk sektor kesehatan. Belanja kesehatan yang lebih besar dari pemerintah berhubungan positif dengan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sektor kesehatan perlu didukung dengan upaya bertahap dari pemerintah, mengingat kapasitas anggaran daerah yang masih rendah dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Implikasinya, pemerintah pusat masih mendominasi sebagai sumber pembiayaan utama (Mahulauw et al., 2017).

Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis bahwa Kemandirian Fiskal Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia. Temuan ini dapat di intrepretasikan bahwa setiap peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah mampu mendanai kebutuhan lokalnya sendiri dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal. Fokusnya adalah menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Peningkatan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) akan berdampak positif pada tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. PAD merupakan sumber dana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di tingkat Kabupaten/Kota. Dampaknya dapat dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena sebagian pendapatan asli daerah dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana layanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, penerapan desentralisasi fiskal pada tingkat daerah menuntut pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya. Keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini kemudian dapat memengaruhi kualitas manusia atau masyarakat di daerah tersebut, termanifestasi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Rante et al., 2018). Seiring dengan peningkatan ekonomi di daerah, infrastruktur dapat terus ditingkatkan, memungkinkan pemerintah daerah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, seperti peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk mandiri dalam pengelolaan daerahnya dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya oleh (Adipura Ira Sri, 2022) dan (Karnoto et al., 2023) yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi membawa dampak positif pada IPM, memungkinkan daerah memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Memoderasi Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana nilai probability lebih kecil daripada nilai taraf signifikansinya (0,0001 < 0,05). Pada kawasan Timur Indonesia, Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran yang signifikan dalam memoderasi pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PDRB sebagai ukuran nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks ini, ketika PDRB meningkat, dapat menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan.

Ketika PDRB meningkat, sumber daya ekonomi yang tersedia untuk alokasi belanja pendidikan juga bertambah. Hal ini dapat menghasilkan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena meningkatnya ketersediaan dana untuk investasi dalam sektor pendidikan. Dengan demikian, pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat dimoderasi oleh tingkat PDRB. Artinya, ketika PDRB tinggi, dampak positif dari belanja pendidikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia cenderung lebih signifikan.

Namun, perlu dikethaui bahwa efektivitas moderasi PDRB terhadap pengaruh belanja pendidikan terhadap IPM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kebijakan pendidikan, infrastruktur, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya di kawasan tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Memoderasi Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh Belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana nilai probability lebih besar daripada nilai taraf signifikansinya (0,7723 > 0,05). Hal ini disebabkan oleh Wilayah Indonesia Timur sering menghadapi tantangan pembangunan yang spesifik, seperti terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, infrastruktur yang rapuh, dan masalah sosial dan ekonomi yang terkait. Meskipun PDRB mencerminkan total pendapatan yang dihasilkan di suatu wilayah, tidak selalu jelas bagaimana PDRB mendistribusikan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan ke seluruh masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan layanan kesehatan.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan elemen-elemen lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara belanja kesehatan dan PHBS di wilayah Indonesia Timur, seperti kebijakan pemerintah, budaya lokal, serta kesenjangan geografis dan demografis. Mungkin diperlukan strategi pembangunan yang lebih terfokus dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam PHBS di wilayah tertentu. Penting untuk menekankan pentingnya diskusi serta pentingnya mengadopsi pendekatan inklusif dalam perencanaan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya adalah untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sosial, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sangat penting untuk membangun kemitraan antara negara, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang menghambat kemajuan pertumbuhan manusia di wilayah tersebut.

Selain berfokus pada peningkatan belanja sosial, penting juga untuk mempertimbangkan elemen-elemen lain yang berkontribusi pada pengembangan individu, seperti akses ke pendidikan berkualitas, perlindungan sosial, penciptaan peluang kerja baru, dan partisipasi ekonomi penduduk lokal. Mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan akan menciptakan dampak positif dan komprehensif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Memoderasi Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana nilai probability lebih kecil daripada nilai taraf signifikansinya (0,0000 > 0,05). Hal ini disebabkan oleh Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB mencerminkan nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu. Studi telah menunjukkan bahwa PDRB memiliki dampak positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan timur Indonesia. Hal ini menandakan bahwa ketika PDRB suatu daerah meningkat, kapasitas fiskal daerah dapat lebih efektif digunakan untuk meningkatkan IPM. Dengan demikian, peningkatan PDRB dapat berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan IPM di kawasan timur Indonesia.

Peningkatan PDRB di kawasan timur Indonesia secara langsung mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membawa dampak positif pada berbagai aspek pembangunan, termasuk kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Ketika PDRB meningkat, pendapatan per kapita masyarakat juga cenderung meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar

lainnya. Dengan demikian, meningkatnya PDRB dapat menjadi katalisator untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan tersebut.

Selain itu, PDRB yang tinggi juga menciptakan peluang investasi yang lebih besar, baik dari sektor publik maupun swasta. Investasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya finansial dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan IPM, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PDRB berperan penting dalam memoderasi pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap IPM di kawasan timur Indonesia. Peningkatan PDRB menciptakan momentum bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kawasan Timur Indonesia sebagai berikut:

1. Belanja daerah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya setiap terjadi peningkatan Belanja daerah bidang pendidikan maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia, dan hal tersebut dapat di jelaskan secara nyata.
2. Belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya setiap terjadi peningkatan Belanja daerah bidang kesehatan maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia, dan hal tersebut dapat di jelaskan secara nyata.
3. Kemandirian Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya setiap terjadi peningkatan Kemandirian Fiskal maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia, dan hal tersebut dapat di jelaskan secara nyata.
4. Hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh Belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
6. Hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adipura Ira Sri, S. R. Dan J. (2022). Effectiveness And Efficiency On Economic Growth And Human Development Index As Intervening Variables. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *7*(2), 82–92.

Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Ekonosia.

Ajija, Shochrul R, D. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.

Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, *2*(1), 11–28. Https://Doi.Org/10.31092/Jia.V2i1.235

Charenza Lazuardy Pratama, C. L. P., & Mandai, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(1), 241–248. Https://Doi.Org/10.25105/Jet.V3i1.15352

Fadli Ali Taslim, R. P. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara*. *4*(2), 528–538.

Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *3*(3), 129–140. Https://Doi.Org/10.22437/Ppd.V3i3.3514

Jaya Bahwiyanti, A. S. (2020). Jieb : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, *5*(November), 1–12. Http://Ejournal.Stiepancasetia.Ac.Id/Index.Php/Jieb

Kalpika Sunu, M. K., & Suyana Utama, M. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan

Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *8*, 843. Https://Doi.Org/10.24843/Eeb.2019.V08.I08.P02

Karnoto, S. Bin, Almasyhari, A. K., & Budiarto, D. S. (2023). Declining Financial Performance Of Local Governments In Indonesia: An Empirical Study During Covid-19. *Maksimum*, *13*(1), 70. Https://Doi.Org/10.26714/Mki.13.1.2023.70-84

Keysa Elviora Djodjobo, D. S. . E. Dan I. M. (2021). Analissi Pengaruh Belanja Pemerintah Dibidang Pendidikan Dan Di Bidang Kesehatan Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Efesiensi*, *21*(01), 13–24.

Kurnia Damayanti Jamada, Syarwani Canon, F. H. Y. A. (2021). *Analysis Of The Effect Of Economic Growth, Investment, And Hdi, On Income Inequality Throughout Sulawes*. 127–136.

Machmud, J., & Djau, S. D. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, *2*(2), 101–109.

Mahulauw, A. K., Santosa, D. B., & Mahardika, P. (2017). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(2), 122. Https://Doi.Org/10.22219/Jep.V14i2.3850

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *4*(2), 163–176. Https://Doi.Org/10.33105/Itrev.V4i2.122

Panggabean, M., Ria, E., & Matondang, L. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah , Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. *Prosiding Satiesp,Isbn: 978-602-53460-3-3*, 154–164.

Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *Inovasi*, *13*(2), 92. Https://Doi.Org/10.29264/Jinv.V13i2.2461

Safitri, I. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, *1*(1), 66–76.

Sari, F. N., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(E-Issn: 2460-0585), 1–16.

Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *5*(2), 105–119. Https://Doi.Org/10.33105/Itrev.V5i2.170

Sintong Afriyansayah, M. K. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto Di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, *5*(3), 248–253.

Siregar, R., Nasution, H. F., & Tanjung, S. F. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *5*(2), 82. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V5i2.1439

Sudiyarti, N., Sutanty, M., & Ariyanto. (2019). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *16*(1), 115–124.

Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, *7*(2), 271. Https://Doi.Org/10.30998/Jabe.V7i2.7653

Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *19*(8). Https://Doi.Org/10.35794/Jpekd.23428.19.8.2018

Wibowo, S. (2016). *Analisi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Di Provinsi Jawa*.

Wikaningrum, T. S. A. (2021). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pdrb Di Jawa Timur Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *5*(2), 247–261.

Yusri, A. (2022). Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, And Education? Evidence From Aceh, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, *6*(1), 1–20. Https://Doi.Org/10.36574/Jpp.V6i1.249

Zakariya, A. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Riset Pembangunan*, *12*(2).